

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

- Informan : 1) Okto Irianto – Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 2) Dr. Ir. Rudyanto Dip., ISM, MIIRSM. MM. MBA., CIQnR., CIQaR – Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- 3) Totok Achmad Sugiharso - Kepala Divisi Statutoria PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- 4) Arief Budi Permana - Kepala Departemen Operasi Klasifikasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- 5) Blandina Pella - Fungsional Diplomat Pertama, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- 6) Febriyanti, S.E., M.M., M.Mar - Penilik Nautis, Teknis dan Radio Kapal, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 7) Capt. Putri Novalia Melani M. Mar - Port State Control Officer, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 8) Capt. Otto K.M Caloh – Sekretaris I *Indonesian National Shipowners Association* (INSA)
- 9) Hutakemri Ali Samad – Sekretaris II *Indonesian National Shipowners Association* (INSA)
- 10) Syafiuddin – Kepala Cabang Pratama Bitung PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- 11) Prof. Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc – Guru Besar Teknik Perkapalan, Universitas Indonesia

Pertanyaan Wawancara	Informan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bagaimana meningkatkan peran Pemerintah Indonesia sebagai <i>flag state administrator</i> untuk kelengkapan administrasi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia?												
1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dokumen dan sertifikat merupakan faktor utama terdetensinya kapal niaga berbendera Indonesia pada kawasan Asia Pasifik?												
2) Bagaimana proses pelayanan administrasi terkait dokumen dan sertifikat kapal niaga di Indonesia yang akan berlayar secara internasional saat ini?												
3) Apakah sistem pelayanan administrasi terkait dokumen dan sertifikat kapal niaga di Indonesia yang akan berlayar secara internasional dapat memenuhi kebutuhan seluruh perusahaan perkapalan dan pemilik kapal?												
4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam memproses dokumen dan sertifikat terkait pelayaran internasional oleh perusahaan perkapalan dan pemilik kapal?												
5) Apakah dilakukan evaluasi dari sistem pelayanan publik terkait pengurusan dokumen dan sertifikat kapal niaga di Indonesia yang akan berlayar secara internasional?												
6) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait standar pelayaran internasional telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan?												

Pertanyaan Wawancara	Informan										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap sistem administrasi terkait dokumen dan sertifikat kapal niaga yang akan berlayar secara internasional di Indonesia kedepannya?											
Bagaimana meningkatkan kepatuhan perusahaan pelayaran dan pemilik kapal niaga Indonesia terkait <i>Fire Safety Measures</i>, <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i>?											
1) Apakah <i>fire safety measures</i> merupakan bagian dari 4 faktor utama terdetensinya kapal niaga berbendera Indonesia pada kawasan Asia Pasifik?											
2) Bagaimana proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>Fire Safety Measures</i> kapal niaga di Indonesia saat ini?											
3) Kapan <i>flag state administrator</i> akan menyatakan bahwa <i>Fire Safety Measures</i> sebuah kapal niaga telah layak dan dapat melakukan pelayaran internasional?											
4) Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan kapal dan pemilik kapal dalam memenuhi standar Tokyo MoU terkait <i>Fire Safety Measures</i> ?											
5) Apakah dilakukan evaluasi proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>Fire Safety Measures</i> ?											
6) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait <i>Fire Safety Measures</i> telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan?											

Pertanyaan Wawancara	Informan										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>Fire Safety Measures</i> kapal niaga yang akan berlayar secara internasional di Indonesia kedepannya?											
8) Apakah <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> merupakan bagian dari 4 faktor utama terdeteksinya kapal niaga berbendera Indonesia pada kawasan Asia Pasifik?											
9) Bagaimana proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> kapal niaga di Indonesia saat ini?											
10) Kapan <i>flag state administrator</i> akan menyatakan bahwa <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> sebuah kapal niaga telah layak dan dapat melakukan pelayaran internasional?											
11) Apakah perusahaan perkapakan dan pemilik kapal niaga memiliki kendala dalam memenuhi standar Tokyo MoU terkait <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> ?											
12) Apakah dilakukan evaluasi proses pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> ?											
13) Apakah seluruh aturan Tokyo MoU terkait <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan?											
14) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pemeriksaan terkait kelengkapan dan kelayakan sistem <i>ISM Deficiencies</i> dan											

Pertanyaan Wawancara	Informan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Pollution Prevention</i> kapal niaga yang akan berlayar secara internasional di Indonesia kedepannya?												
15) Apakah terdapat keterkaitan antara terjaganya <i>Fire Safety Measures</i> , <i>ISM Deficiencies</i> dan <i>Pollution Prevention</i> sebuah kapal niaga Indonesia dengan keamanan maritim Indonesia?												
Bagaimana meningkatkan upaya diplomasi Indonesia untuk mempertahankan <i>white list status</i> pelayaran internasional?												
1) Apakah Indonesia perlu menjalin berbagai kerjasama regional dan internasional dengan negara-negara anggota Tokyo MoU yang telah memiliki <i>White List</i> status Tokyo MoU?												
2) Bagaimana cara Indonesia dalam melakukan kerjasama regional dan internasional dengan negara-negara anggota Tokyo MoU yang telah memiliki <i>White List</i> status Tokyo MoU?												
3) Apakah masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda terkait sistem pemeriksaan dan kontrol terhadap performa kapal niaga berdasarkan Tokyo MoU?												
4) Apakah manfaat yang didapatkan oleh Indonesia ketika melakukan diplomasi maritim dengan negara-negara anggota Tokyo MoU yang telah memiliki <i>White List</i> status Tokyo MoU?												
5) Apakah terdapat perbedaan upaya diplomasi maritim ketika Indonesia berada pada <i>black list</i> Tokyo MoU dengan perubahan status Indonesia menjadi <i>white list</i> Tokyo MoU?												
6) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia saat ini dan masa mendatang?												

Pertanyaan Wawancara	Informan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7) Apakah terdapat pengaruh masuknya Indonesia pada <i>white list</i> Tokyo MoU status pelayaran internasional terhadap perekonomian nasional Indonesia?												
8) Apakah terdapat pengaruh atas masuknya masuknya Indonesia pada <i>white list</i> Tokyo MoU status terhadap pertahanan negara?												

LAMPIRAN II SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BI 2704 /IX/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 16 September 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

Di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Annisa Mutia Pranita, NIM: 120200302004, Nomor HP: +6281375421112, email: pranitannisa@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "White list – Tokyo MoU" Status Pelayaran Internasional".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Korwasi Keamanan Nasional,



Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Annisa Mutia Pranita, S.Sos., MM., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor : B/ 2706 /IX/2021
Tanggal : 16 September 2021

DAFTAR PEJABAT

1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
2. Kasubdit Keselamatan Kapal, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
3. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Bidang Keselamatan Maritim, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Staf Ahli Bidang Hukum Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
6. Direktur Utama, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
7. Kepala Divisi Statutoria, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
8. Kepala Departemen Operasi Klasifikasi, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
9. Direktur Produksi, PT. PAL Indonesia (Persero).
10. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA).
11. Prof. Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc., Guru Besar Teknik Perkapalan, Universitas Indonesia.
12. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D. CMARTECH, Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Dr. Eng. Trika Pitana, S.T., M.Sc., Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunhasir, S.Sos., MM., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 3133 /X/2021 Jakarta, 18 Oktober 2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Kepada

Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan
 Afrika, Kementerian Luar Negeri
 Republik Indonesia

Di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/III/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Annisa Mutia Pranita, NIM: 120200302004, Nomor HP: +6281375421112, email: pranitannisa@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "White list – Tokyo MoU" Status Pelayaran Internasional".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan bapak/ibu Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Dr. Ir. Rudiyanto Dip., ISM, MIIRSM. MM. MBA.,
CIQnR., CIQaR
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "White list – Tokyo MoU" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 November 2021



Dr. Rudiyanto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Totok Achmad Sugiharso
Jabatan : Kepala Divisi Statutoria
Instansi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "*White list – Tokyo MoU*" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 November 2021



TOTOK AHMAD SUGIHARSO
NUP. 35890 - KI

Contact

Jl. Yos Sudarso No. 38-
40JAKARTA - 14320
INDONESIA

Phone: (62-21) 4301017,
43611903
Fax: (62-21) 43932509
e-mail: bk@bki.co.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B.12061b/UM.205/KI-22

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budi Permana
Jabatan : Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
Instansi : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "*Whitelist – Tokyo MoU*" Status Pelayaran Internasional".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 November 2021



Arief Budi Permana
NUP. 42896-KI

Contact

Jl. Yos Sudarso No. 38-40
JAKARTA - 14320
INDONESIA

Phone: (62-21) 4301017, 43611903
Fax: (62-21) 43932509
e-mail: ho@bki.co.id



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Okto Irianto
Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum Laut
Instansi : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju “*White list – Tokyo MoU*” Status Pelayaran Internasional”.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 November 2021



Okto Irianto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Prof. Dr. Ir. Sunaryo, MSc.
Jabatan : Guru Besar Teknik Perkapalan Universitas Indonesia
Instansi : Universitas Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju “*White list – Tokyo MoU*” Status Pelayaran Internasional”.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Desember 2021



Prof. Dr. Ir. Sunaryo, M. Sc



DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)
 PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION
 Head Office : 10. Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat - 10160, Indonesia
 Phone : (62-21) 3447149, 3840993, 3842307 – Cable : DPPINSA Jakarta
 Fax. : (62-21) 3849522 - Website: www.insa.or.id – E-mail: info@insa.or.id

SURAT KETERANGAN

No. 010/INSA/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Capt. Otto K.M Caloh
 Jabatan : Sekretaris I INSA
 Instansi : Indonesian National Shipowners Association (INSA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
 NIM : 120200302004
 Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
 Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "White list – Tokyo MoU" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Desember 2021

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION
 DEWAN PENGURUS PUSAT

Capt. Otto K.M Caloh

Member of





DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)
 PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION
 Head Office : 10. Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat - 10160, Indonesia
 Phone : (62-21) 3447149, 3840993, 3842307 - Cable : DPPINSA Jakarta
 Fax. : (62-21) 3849522 - Website: www.insa.or.id - E-mail: info@insa.or.id

SURAT KETERANGAN

No. 011/INSA/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Hutakemri Ali Samad
 Jabatan : Sekretaris II INSA
 Instansi : Indonesian National Shipowners Association (INSA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
 NIM : 120200302004
 Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
 Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "White list – Tokyo MoU" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Desember 2021

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION
 DEWAN PENGURUS PUSAT

Hutakemri Ali Samad
 H - ALI SAMAD

Member of



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Syafiuddin
Jabatan : Kepala Cabang
Instansi : PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
Cabang Pratama Bitung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "*White list – Tokyo MoU*" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Januari 2022



Syafiuddin
NUP.60505-KI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : FEBRIYANTI, SE, M.M.Tr, M.Mar
Jabatan : Penilik Nautis, Teknis, dan Radio Kapal
Instansi : Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan

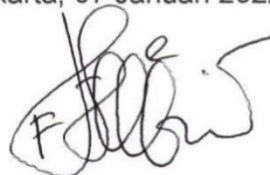
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Mutia Pranita
NIM : 120200302004
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Peningkatan *Flag State Administrator* Indonesia Menuju "*White list – Tokyo MoU*" Status Pelayaran Internasional".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Januari 2022

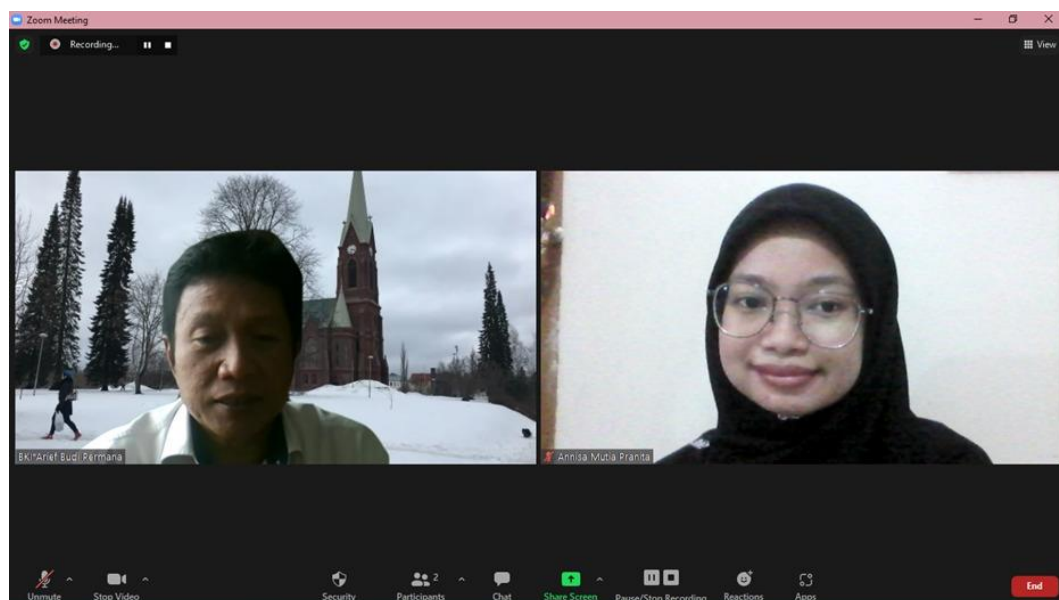


(FEBRIYANTI, SE, M.M.Tr, M.Mar)

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Direktur Utama BKI beserta jajarannya



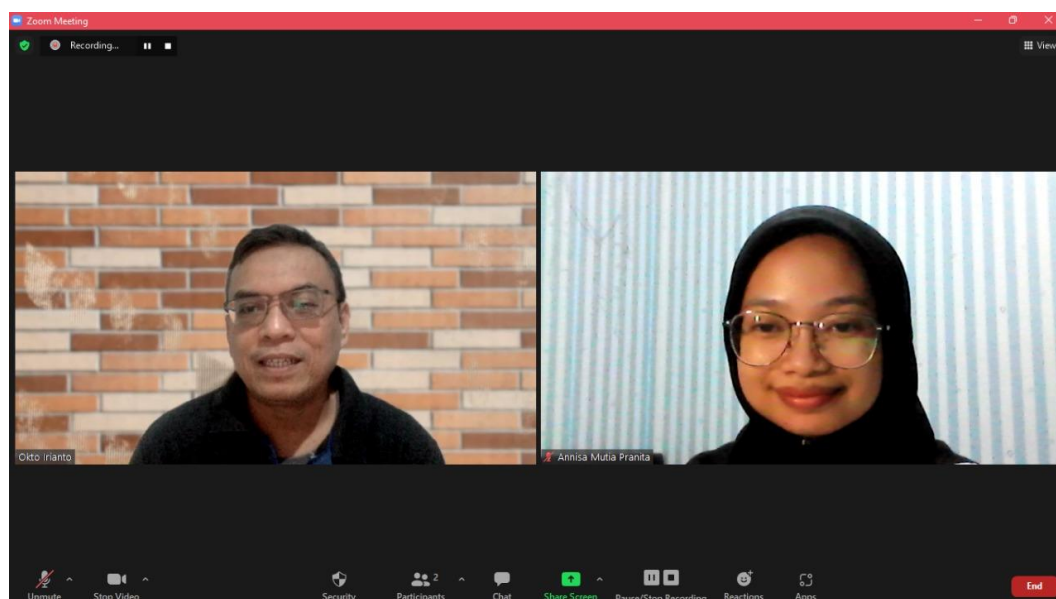
Wawancara bersama Kepala Departemen Operasi Klasifikasi BKI



Wawancara bersama Kepala Divisi Statutoria BKI



Wawancara bersama Fungsional Diplomat Pertama, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia



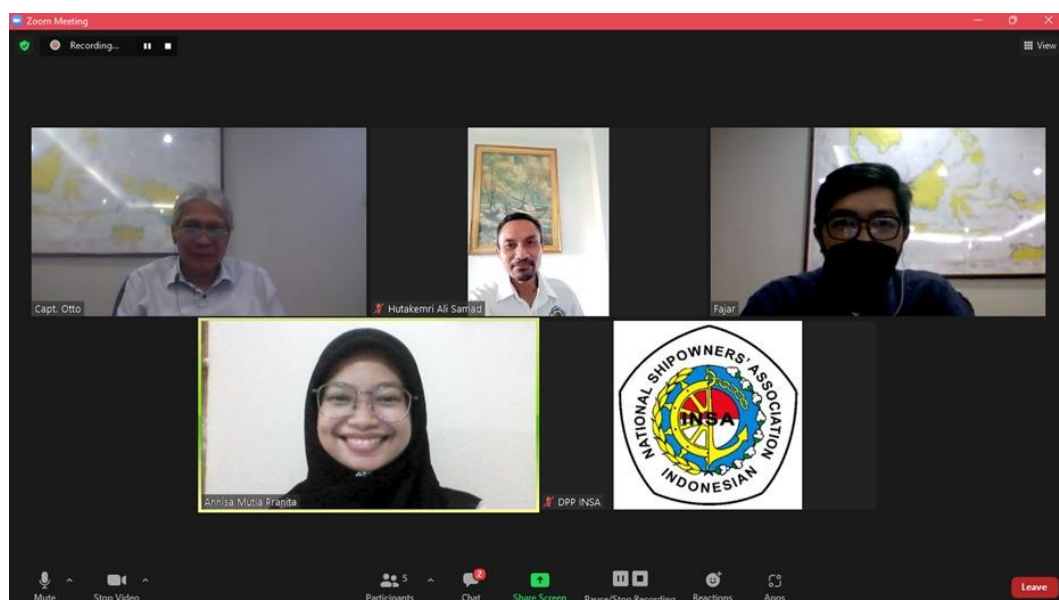
Wawancara bersama Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



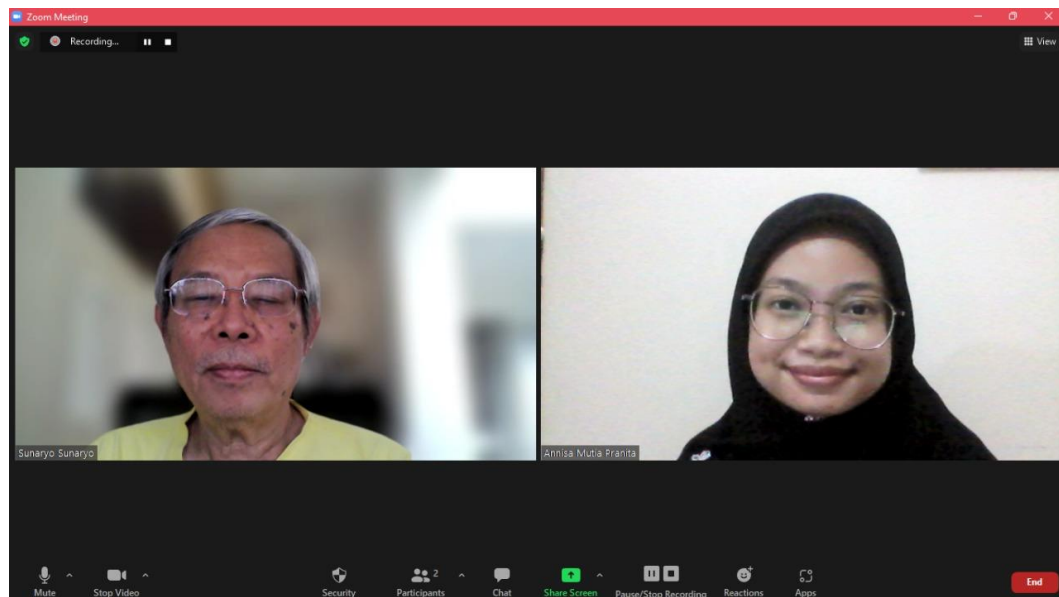
Wawancara bersama Kasubdit dan *Port State Control Officer* Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



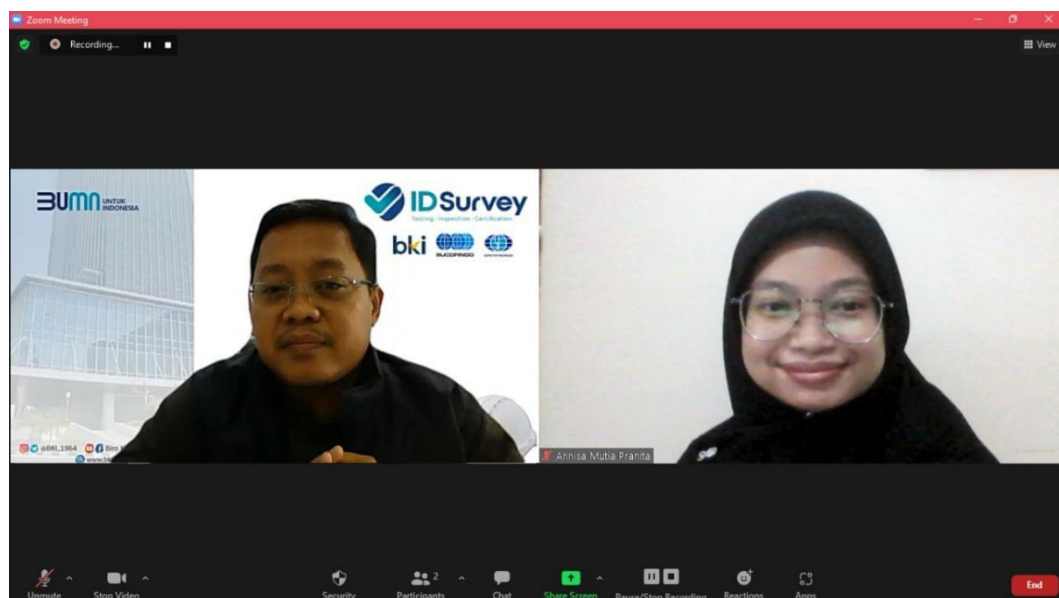
Wawancara bersama Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia



Wawancara bersama Sekretaris I dan II *Indonesian National Shipowners
Association (INSA)*



Wawancara bersama Guru Besar Teknik Perkapalan Universitas Indonesia



Wawancara bersama Kepala Cabang Pratama Bitung BKI